SIRD #95
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

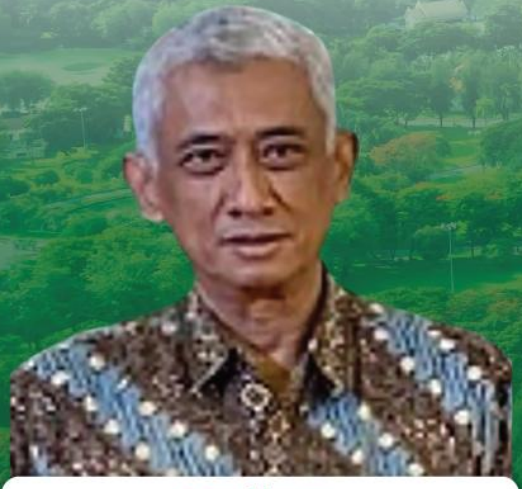
Social Investment Indonesia

FREE

DAPATKAN GIVEAWAY !

Beyond the Green Hype:

Membedah Kompleksitas, Paradoks, dan Keadilan dalam Ekosistem Pasar Karbon Indonesia



Mulkan
Kadiv. Penghimpunan Dana dan Pengembangan Layanan
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup



Riza Suarga
Chairman
Indonesia Carbon Trade Association



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Host:



Peggy Arnolia
Senior Consultant
Social Investment Indonesia

Jumat, 10 April 2026

15.00 - 17.00 WIB

socialinvestment.id

0812-3383-8463

Via zoom @SocialInvestment_Id

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

bpdlh
badan pengelola dana lingkungan hidup

Pasar Karbon di Indonesia: Perspektif Kebijakan, Pembiayaan & Tata Kelola



Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Jakarta, April 2026

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP
SEBAGAI PENGELOLA DANA MENDUKUNG PEMERINTAH RI

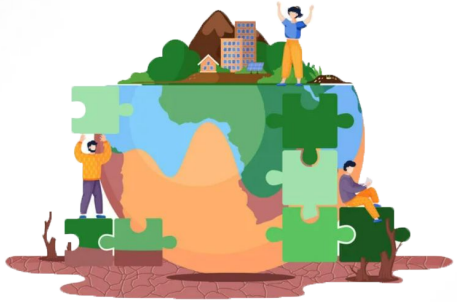
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DJPb Indonesian Treasury
bpdlh badan pengelola dana lingkungan hidup

BPDLH mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GRK serta memenuhi Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). BPDLH memfasilitasi penyaluran pendanaan domestik dan internasional, baik dari sektor publik maupun swasta, melalui berbagai instrumen keuangan di berbagai sektor.



Lingkungan merupakan isu lintas sektor

Sektor Kehutanan, Energi, Perdagangan Karbon, Layanan Lingkungan, Industri, Transportasi, Agrikultur, Kelautan dan Perikanan, dan lainnya.



Hub Kolaborasi Lintas Sektoral

Kewenangan teknis tetap berada pada kementerian/lembaga dan kerja sama dalam penggunaan dana.

bpdlh badan pengelola dana lingkungan hidup

Mekanisme Pendanaan

Peningkatan akses terhadap sumber pendanaan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola adaptif untuk mendukung jalur pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP

Lini Kementerian/Pemilik Program

PEMILIK DANA

- Donor
- Filantropi
- Swasta
- APBN

USD 1.72 Billion

GCF · Norway · World Bank · UNDP · UNCDF · GGGI · CLUA · Ford Foundation · GIZ · KfW · UK · APBN

bpdlh
badan pengelola dana lingkungan hidup

- AFOLU & Sustainable Ecosystem
- Just & Affordable Clean Energy
- Circular Economy & Zero Waste Emission
- Health, Water, & Food Security
- Climate & Disaster Resilience

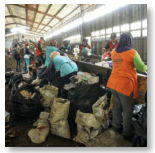




- REDD+
- FOLU
- TERRA
- MANGROVE




- PLTS Atap
- LCDI



- SGAC Seed Banyumas
- DNS




- Catalytic Fund
- FDB




- Pooling Fund Bencana
- DRFI

SAFEGUARD

- **Kepatuhan** terhadap **regulasi** dan akuntabilitas.
- **Tenaga kerja** dan **kondisi kerja.**
- Efisiensi sumber daya & komitmen untuk melindungi **kualitas lingkungan.**
- **Kesehatan** dan **keselamatan** masyarakat.
- Rencana **pemukiman kembali** dan **pembatasan penggunaan lahan.**
- **Konservasi keanekaragaman hayati & pengelolaan berkelanjutan SDA hayati.**
- **Perlindungan** serta partisipasi/keterlibatan **masyarakat adat.**
- Perlindungan **warisan budaya**.
- **Komitmen lingkungan** dan **sosial** dari lembaga keuangan perantara.
- Keterlibatan **pemangku kepentingan & pengungkapan informasi.**
- **Risiko emisi** atau potensi **kebocoran karbon.**
- Kualitas sosial masyarakat, kesetaraan gender, & pemberdayaan kelompok rentan.

Instrumen Pendanaan

Hibah
- *REDD+*
- *FOLU*
- *TERRA*
- *M4CR*
- *Disaster*
- *Energy*
- *Impact Fund*

Pinjaman
- *Rehabilitation*
- *Ecological Restoration*

Dana Abadi
- *Disaster Fund*

Blended/Creative Finance*

Instrumen pendanaan yang dimiliki oleh BPDLH mendorong mekanisme pembiayaan campuran/kreatif, seperti:
- ***Penjaminan Kredit***
- ***Fasilitas Derisking***

Badan Pengelola

Mandat Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110/2025

Peraturan Presiden No. 77/2018
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

"Penyaluran dana lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk: perdagangan karbon, pinjaman, subsidi, hibah, dan/atau mekanisme lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

- Pasal 6 (2)

Peraturan Presiden No. 110/2025
Pelaksanaan NEK oleh BPDLH

"Pelaksanaan pengelolaan dana dan pembagian manfaat dari perdagangan karbon, Pembayaran Berdasarkan Kinerja (RBP), dan pungutan karbon dapat dilakukan melalui lembaga yang mengatur pengelolaan dana."

- Pasal 74 (1)

Peraturan Presiden Nomor 110/2025
Penerapan Kebijakan NEK dalam lingkup BPDLH

*Jenis penerimaan negara dari **pungutan karbon** melalui **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** yang dikelola oleh lembaga pengelola dana lingkungan atau lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 74 (2)

Pengelolaan PNBP sesuai mandat peraturan

"Dalam hal terdapat penyesuaian pengelolaan dan alokasi dana, penyesuaian tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- Pasal 74 (3)

Program Pendukung Instrumen NEK
yang Dikelola oleh BPDLH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DJPb Indonesian Treasury
bpdlh

Proyek Partnership for Market Implementation telah mencapai kemajuan substantif dalam memperkuat landasan kebijakan, kelembagaan, dan teknis Indonesia untuk implementasi pasar karbon, sekaligus beradaptasi dengan mandat regulasi yang terus berkembang serta kebutuhan integrasi sistem.

Di berbagai komponen, **proyek ini berfokus pada peningkatan** kesiapan regulasi, pengembangan infrastruktur MRV, keterlibatan pemangku kepentingan, serta dukungan manajemen proyek.

Aktivitas Utama dan Milestone Proyek PMI

1. Peluncuran **Perdagangan Karbon Internasional** untuk Pasar Indonesia
2. Sebanyak **6 (enam) Perjanjian MRA Internasional** telah ditandatangani
3. Mendukung pembaruan pada Sistem Registri Nasional (SRN) serta pengembangan lanjutan fungsi *SRUK
   **SRUK = Sistem Registri Unit Karbon*
4. Standar Kompetensi Nasional untuk Validasi & Verifikasi Kredit Karbon pada sektor energi **diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan**
5. Pelaksanaan **FGD peningkatan kapasitas** NEK secara nasional
6. **Regulasi turunan Perpres 110/2025** terkait instrumen NEK dalam **tahap penyusunan**
   (Permen 16/2022 ESDM, Regulasi PNBP untuk Bagi Hasil Kredit Karbon, Peta Jalan Terintegrasi Penetapan Harga Karbon, Peta Jalan ETS Industri, Permen LH terkait Sistem Registri Unit Karbon, Permen ESDM terkait Perdagangan Karbon sektor Energi, dll.)
7. Pelaksanaan diseminasi instrumen NEK dan **peningkatan kapasitas inventarisasi GRK di 5 wilayah subnasional** telah dilakukan

6 K/L Penerima Manfaat dari 4 institusi pemerintah

- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- BPDLH/ Kementerian Keuangan

- ➔ **Pusat Industri Hijau**
- ➔ **Direktorat Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon**
- ➔ **Direktorat Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim**
- ➔ **Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca MPV**
- ➔ **Direktorat Konservasi Energi**
- ➔ **Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan**

Jumlah Aktivitas yang telah diimplementasikan berdasarkan komponen
Sumber: PMI BPDLH Analysis 2026

Komponen Proyek	Aktivitas 2025
Komponen 1 ***Analisis Kebijakan dan Peta Jalan***	39
Komponen 2 ***Penguatan Institusi dan Peningkatan Kapasitas***	28
Komponen 3 ***Desain Instrumen dan Infrastruktur MPV***	39
Komponen 4 ***Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi***	7
Komponenn 5 ***Administrasi Keproyekan***	33

4910 Partisipan terlibat
152 Total aktivitas
5:4 Rasio laki laki dan perempuan

Peran BPDLH dalam Implementasi Instrumen NEK Berbasis Pasar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DJPb Indonesian Treasury
bpdlh

Program *Catalytic Funding for Mitigation Outcomes (MO)*

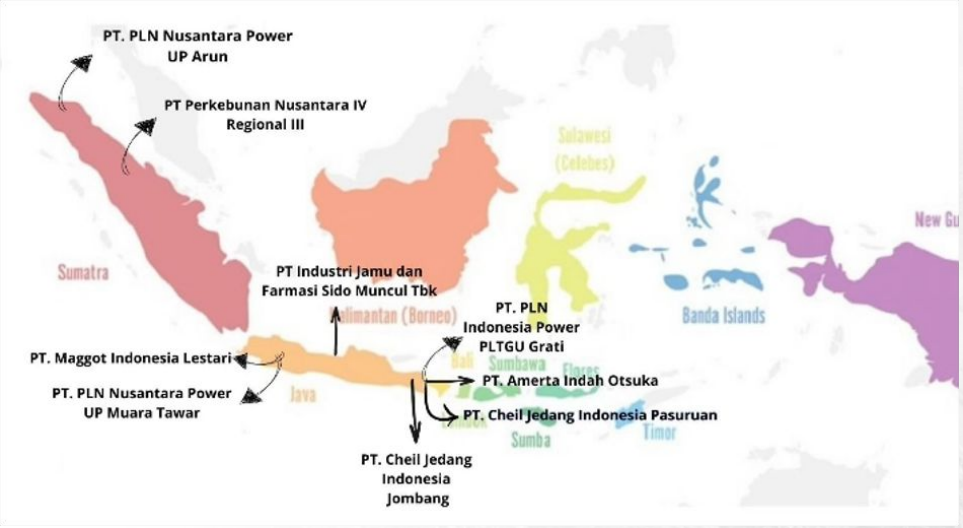
Melalui Program **"JSB - Advancing Indonesia's NDC Targets in The Energy Sector"** BPDLH melaksanakan kegiatan Mitigation Outcome untuk mendukung proponent agar dapat berpartisipasi dalam Skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) di bawah Sistem Registri Nasional (SRN) melalui dukungan penyusunan Dokumen Desain Proyek (DRAM) hingga tahap validasi.

5,775,744 ton CO2e

Potensi Reduksi Emisi Total

12 DRAM telah divalidasi

*Dari **8** pelaku aksi mitigasi*



Sebaran Lokasi Proyek *Mitigation Outcomes*

Program Reduksi Emisi berbasis Lahan
Dikelola oleh BPDLH

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

bpdlh

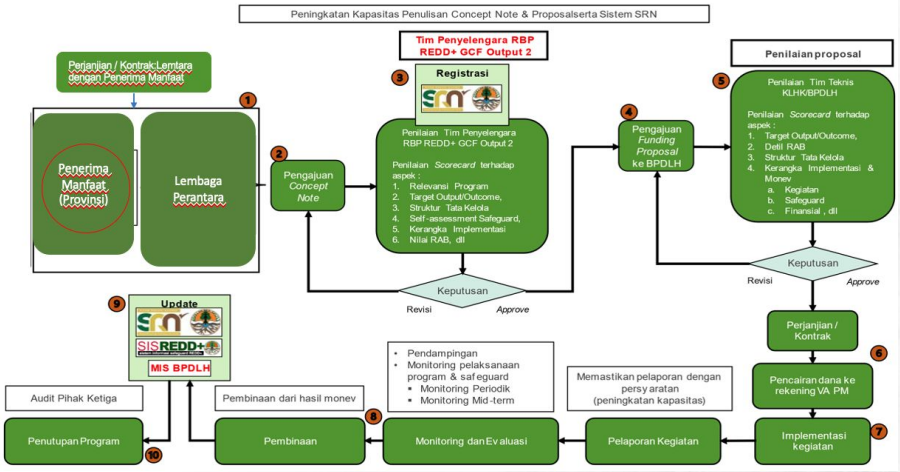
Result-Based Contribution Norway for FOLU Net Sink 2030



Reduksi emisi sektor FoLU level subnasional

Norwegia mendukung FOLU Net Sink 2030 Indonesia melalui pembayaran berbasis hasil untuk reduksi emisi terverifikasi sektor hutan. Perjanjian termasuk kontribusi awal sebesar **$56 juta (RBC 1) dan $50 juta (RBC 2).**

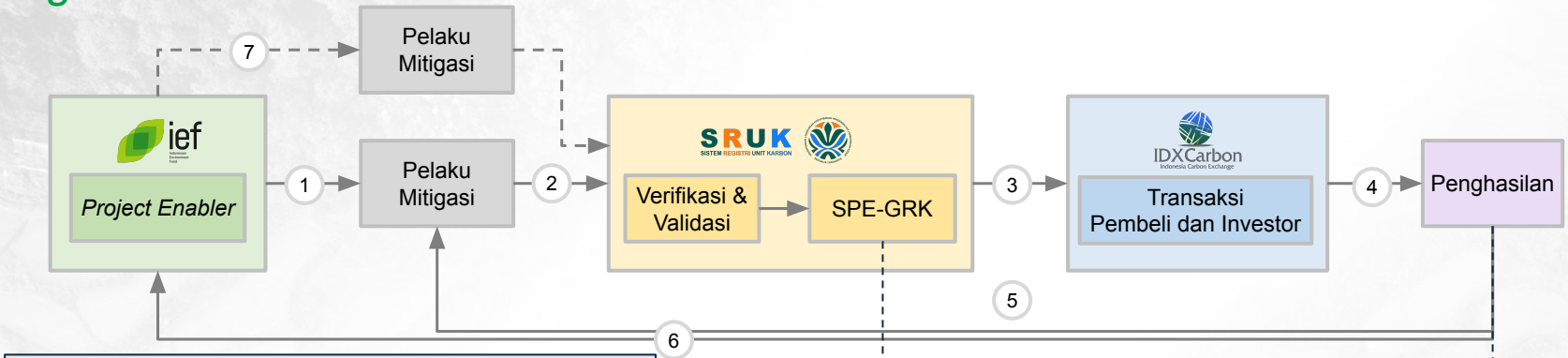
Green Climate Fund (GCF) Output 2 (Result Based Payment)



Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengendalian Kebakaran Hutan, Pengelolaan Hutan Lestari.

GCF Output 2 mendukung perlindungan hutan, kehidupan masyarakat, dan reduksi emisi di 15 provinsi. Kegiatan kunci termasuk mengelola dana melalui perantara, menguatkan perhutanan sosial dan mendukung FOLU Net Sink 2030.

Model Pengelolaan Dana Indikatif*
Berdasarkan Mekanisme Pungutan Karbon yang Dikelola oleh BPDLH



PNBP dari perdagangan karbon berpotensi berasal dari:
- Biaya layanan penerbitan SPE-GRK
- Pungutan karbon dari transaksi SPE-GRK

Kredit Karbon Tersedia (tCO2e)

14.703.362

Januari 2026
(IDX Carbon)

POTENSI PNBP
dari SPE-GRK YoY (IDR)

44.11 B

Pungutan PNBP di Rp3.000/SPE-GRK
(SRN-PP; PP 36/2024)

POTENSI PNBP
dari pungutan transaksi YoY (IDR)

23.52 B

- Diasumsikan pungutan sebesar 2% dari total transaksi, dikalikan dengan rata-rata transaksi di IDX Carbon (Rp80.000 per unit SPE-GRK).
- Dasar regulasi masih dalam tahap perumusan.



TERIMA KASIH

bpdlh.id
www.bpdlh.kemenkeu.go.id
bpdlh@kemenkeu.go.id
0213505226
bpdlh

JB Tower Lt 29-30, Jl. Kebon Sirih
No. 48-50, RT 011/002, Gambir,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110